

BAB IV
PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH

4.1. TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN

Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Kabupaten Karawang ini memperhatikan misi Bupati/Wakil Bupati Karawang terutama Kebijakan pembangunan yang merupakan penjabaran tujuan dan sasaran misi Bupati Karawang periode 2010-2015. Kebijakan pembangunan tersebut menjadi pedoman dalam melaksanakan program dan kegiatan selama periode tahun 2011 - 2015.

- 1) **Misi 1** : Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat yang cerdas, sehat, berbudaya dan religius yang harmonis, dengan kebijakan :
 - a. Bidang Pendidikan
 - (1) Mengalokasikan anggaran untuk meringankan beban biaya pendidikan;
 - (2) Peningkatan mutu dan kesejahteraan tenaga pendidik;
 - (3) Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan yang berstandar;
 - (4) Meningkatkan pemerataan dan mutu pendidikan luar sekolah;
 - (5) Penguatan dan pelaksanaan regulasi, pranata serta norma standar pedoman dan ketentuan (NSPK) bidang pendidikan;
 - (6) Penguatan kelembagaan dan manajemen sumberdaya manusia;
 - (7) Penguatan fungsi perencanaan, evaluasi dan pengendalian program kerja penyelenggaraan pendidikan yang berbasis data dan informasi;
 - (8) Pembangunan Institut Kelautan dan Perikanan Nasional (IKPN).
 - b. Bidang Perpustakaan
 - (1) Pengembangan layanan perpustakaan.
 - c. Bidang Kesehatan
 - (1) Pengembangan desa siaga menuju desa sehat;

- (2) Pelayanan kesehatan masyarakat miskin dan asuransi semesta (*Universal Coverage*);
 - (3) Penurunan resiko kematian ibu, bayi dan balita;
 - (4) Pelayanan vaksinasi dasar lengkap;
 - (5) Mewujudkan sistem surveillans dan monitoring;
 - (6) Pengadaan dan pemerataan obat serta perbekalan kesehatan;
 - (7) Menurunkan prevalensi gizi kurang dan gizi lebih;
 - (8) Penanggulangan gizi kurang;
 - (9) Peningkatan sarana kesehatan yang terstandar dan terakreditasi;
 - (10) Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesehatan;
 - (11) Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dasar dan rujukan.
- d. Bidang Keluarga Berencana
- (1) Penyediaan pelayanan, penyuluhan dan advokasi kesehatan reproduksi.
- e. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
- (1) Meningkatkan upaya-upaya pemberdayaan perempuan;
 - (2) Penyediaan pelayanan rehabilitasi, penyuluhan dan advokasi terhadap tindak kekerasan dan *trafficking*.
- f. Bidang Sosial
- (1) Meningkatkan fungsi sosial penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) penerima manfaat;
 - (2) Sinkronisasi kebijakan dan pelaksanaan upaya-upaya penanggulangan kemiskinan.
- g. Bidang Kepemudaan dan Olah Raga
- (1) Pembinaan kelembagaan kepemudaan;
 - (2) Pengembangan prestasi atlet daerah dan pembangunan sarana olahraga;
 - (3) Peningkatan prestasi olahraga.
- h. Bidang Kebudayaan
- (1) Pengembangan kapasitas pelaku budaya;
 - (2) Pengembangan nilai-nilai budaya dan kearifan lokal;
 - (3) Pelestarian situs sejarah dan budaya.

- i. Bidang Pengembangan Nilai-nilai Keagamaan
 - (1) Pembinaan kehidupan antar dan inter umat beragama;
 - (2) Fasilitasi dan pembinaan aktifitas kehidupan keagamaan.
- 2) **Misi 2** : Penguatan Struktur dan Kelembagaan Ekonomi Daerah, dengan kebijakan :
 - a. Bidang Pertanian
 - (1) Pengembangan usaha-usaha agribisnis pertanian komoditas tanaman pangan dan hortikultura melalui penyediaan sarana dan prasana produksi, pemberdayaan kelembagaan, penerapan inovasi dan teknologi pertanian, pengembangan industri pengolah hasil pertanian;
 - (2) Pengembangan sistem dan sumberdaya penyuluh pertanian;
 - (3) Pengembangan sektor peternakan diarahkan pada peningkatan skala usaha melalui rintisan pola agribisnis, fasilitasi desain produk, penanganan produksi dan pengendalian penyakit ternak;
 - (4) Rintisan pengembangan *one village one product* sektor pertanian;
 - (5) Pembangunan terminal agribisnis daerah.
 - b. Bidang Kelautan dan Perikanan
 - (1) Pengembangan sentra-sentra produksi perikanan menuju pengembangan kawasan minapolitan;
 - (2) Pembangunan rumah potong hewan berbasis tata ruang.
 - c. Bidang Industri
 - (1) Pengembangan regulasi, fasilitasi dan iklim usaha bagi masuknya investasi sektor industri;
 - (2) Pengembangan industri kecil dan menengah yang mampu memanfaatkan posisi dalam rantai nilai industri dan potensi sumberdaya lokal melalui pengembangan sentra IKM, kemitraan usaha, pengembangan kelembagaan dan kewirausahaan IKM.
 - d. Bidang Perdagangan
 - (1) Pengembangan regulasi, fasilitasi dan iklim usaha serta sarana prasarana perdagangan dalam mendukung sistem distribusi barang produksi dan konsumsi;

- (2) Pengembangan kerjasama perdagangan dalam rangka mendukung promosi produk unggulan daerah.
- e. Bidang Pariwisata
- (1) Penyediaan fasilitasi, regulasi dan iklim usaha kepariwisataan daerah;
 - (2) Pengembangan sarana dan prasarana obyek daya tarik wisata (ODTW);
 - (3) Pembinaan dan pemberdayaan pelaku usaha serta kemitraan sektor pariwisata daerah.
- f. Bidang Ketenagakerjaan
- (1) Peningkatan kualitas angkatan kerja daerah yang berbasis kebutuhan pasar tenaga kerja;
 - (2) Penyediaan informasi ketenagakerjaan;
 - (3) Pengembangan kebijakan, pembinaan dan pengawasan regulasi bidang ketenagakerjaan.
- g. Bidang Koperasi dan usaha Mikro, Kecil dan Menengah
- (1) Meningkatkan kemampuan kewirausahaan UMKM dan sistem kelembagaan koperasi;
 - (2) Meningkatkan skala usaha KUMKM melalui fasilitasi pembiayaan, pengembangan kerjasama, promosi dan akses pasar, pengembangan inovasi dan teknologi serta standarisasi desain produk;
 - (3) Membangun dan meningkatkan lembaga ekonomi mikro dan menengah dengan sistem bagi hasil yang proporsional. Strategi yang direncanakan adalah membangun lembaga-lembaga ekonomi mikro dan menengah dengan sistem bagi hasil.
- 3) **Misi 3** : Meningkatkan Pelayanan Ketersediaan Infrastruktur Wilayah, dengan kebijakan :
- a. Bidang Tata Ruang
- (1) Melaksanakan percepatan penyelesaian regulasi daerah, standar dan pedoman bidang penataan ruang;
 - (2) Meningkatkan koordinasi dan pemantapan keterpaduan pemanfaatan serta pengendalian ruang wilayah yang selaras dengan pola dan struktur ruang wilayah;

- (3) Menetapkan kawasan rawan bencana dan mengembangkan sistem penanganan bencana;
 - (4) Jalan antar kawasan.
- b. Bidang Pekerjaan Umum
- (1) Mengembangkan ruas jalan kolektor primer penghubung antar pusat kegiatan (PKW - PKL dan antar PKL) pada ruas jalan kabupaten diarahkan pada :
 - a) Meningkatkan kualitas konstruksi jalan sesuai dengan kelas dan fungsi jalan (persyaratan lebar minimal perkerasan 7 m, bahu jalan 1,5 m, drainase 1 m);
 - b) Meningkatkan status jalan kabupaten menjadi jalan provinsi dan nasional;
 - c) Membangun ruas jalan baru yang mendukung pengembangan wilayah, sesuai ketentuan teknis, kelas dan fungsi jalan yang direncanakan;
 - d) Meningkatkan segmen jalan lintas yang masih dibawah standar untuk memenuhi persyaratan lebar minimum (6 m dengan memperhatikan kondisi lokasi).
 - (2) Meningkatkan infrastruktur jalan penghubung pusat pengembangan wilayah (kolektor sekunder PKL/PPL dan antar PPL) pada ruas jalan Kabupaten :
 - a) Meningkatkan kualitas konstruksi jalan sesuai dengan kelas dan fungsi jalan (persyaratan lebar minimal perkerasan 4 m, bahu jalan 1 m, drainase 1 m);
 - b) Meningkatkan segmen jalan lintas yang masih di bawah standar untuk memenuhi persyaratan lebar minimal (4 m dengan memperhatikan faktor lokasi).
 - (3) Meningkatkan infrastruktur jalan pedesaan dengan diarahkan pada meningkatkan infrastruktur jalan poros desa penghubung PPK/PPL dengan desa, diarahkan pada peningkatan kemantapan struktur konstruksi jalan *rigid/hotmix* (persyaratan lebar minimal perkerasan 3,5 m, bahu jalan 0,75 m, drainase 0,5 m);
 - (4) Mempertahankan kondisi konstruksi jembatan sesuai rencana umur teknis yang telah ditetapkan;

- a) Membangun jembatan penghubung pada lokasi strategis;
 - b) Optimalisasi manajemen pemeliharaan konstruksi jembatan.
- (5) Meningkatkan koordinasi pemanfaatan, efisiensi penyaluran, pengembangan dan pemeliharaan jaringan irigasi dengan memperhatikan kualitas, kuantitas dan kontinuitas aliran;
 - (6) Meningkatkan upaya-upaya konservasi sumberdaya air dan keterpaduan pengelolaan daerah aliran sungai;
 - (7) Mengembangkan sistem prasarana pengendalian banjir dan penanganan abrasi pantai;
 - (8) Kajian data teknis jalan, jembatan dan pengairan;
 - (9) Mengembangkan pelayanan jaringan air bersih bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan wilayah rawan air bersih;
 - (10) Meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja pelayanan air bersih;
 - (11) Mengembangkan kebijakan pengolahan air limbah secara partisipatif;
 - (12) Mengembangkan sistem regulasi, manajemen dan sarana prasarana pelayanan persampahan;
 - (13) Pengembangan kebijakan dan penataan lingkungan kumuh pemukiman;
 - (14) Penataan taman kota dengan memperhatikan aspek estetika, fungsi dan nilai arsitektural;
 - (15) Penyediaan lapangan olahraga masyarakat di Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) dan Pusat Kegiatan Lokal (PKL);
 - (16) Penataan bangunan publik yang memiliki nilai historis, religi dan fungsi sosial lainnya;
 - (17) Menyediakan instrumen kebijakan, mekanisme dan fasilitasi penyelenggaraan perumahan dan permukiman yang terjangkau baik melalui mekanisme pasar maupun mekanisme yang bertumpu pada keswadayaan masyarakat;

(18) Meningkatkan pengelolaan dan pemeliharaan saluran irigasi berbasis partisipasi masyarakat.

c. Bidang Perhubungan

- (1) Meningkatkan kualitas sarana prasarana perhubungan yang terintegrasi dalam sistem jaringan transportasi;
- (2) Mengembangkan kebijakan sistem jaringan transportasi daerah;
- (3) Penegakan hukum dan disiplin lalu lintas, angkutan dan jalan.

4) **Misi 4** : Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah, dengan kebijakan :

a. Bidang Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

- (1) Penyusunan dan pelaksanaan kebijakan manajemen kepegawaian dan peningkatan kualitas SDM aparatur;
- (2) Pengembangan kebijakan, penataan struktur organisasi, ketatalaksanaan dan sistem prosedur kerja berbasis Teknologi Informasi (TI);
- (3) Pengembangan kebijakan dan pengelolaan pendapatan dan pembiayaan daerah;
- (4) Pengembangan sistem akuntansi keuangan daerah yang akuntabel;
- (5) Meningkatkan ketersediaan sarana prasarana aparatur sesuai kebutuhan dan standarisasi yang ditetapkan;
- (6) Pengembangan kebijakan dan pengelolaan barang milik daerah;
- (7) Pengembangan kebijakan penanaman modal dan pelayan perizinan;
- (8) Melaksanakan pemeriksaan dan pembinaan secara komprehensif serta penilaian terhadap penerapan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah seluruh OPD;
- (9) Peningkatan kapasitas legislatif;
- (10) Fasilitasi peningkatan peran dan fungsi parpol serta orsos/ormas.

- b. Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil
 - (1) Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil
 - c. Bidang Perencanaan Pembangunan
 - (1) Pengembangan kebijakan perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan berbasis data;
 - (2) Pembuatan *master plan* sistem penyediaan air minum se-Kabupaten Karawang;
 - (3) Pembuatan *master plan* pembangunan jalan-jalan di Kabupaten Karawang dari jalan-jalan batang-cabang dan jalan-jalan ranting;
 - (4) Pembuatan *master plan* pembangunan dan perbaikan saluran irigasi yang sistematis.
 - d. Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
 - (1) Pembinaan, pendidikan politik dan bela negara;
 - (2) Koordinasi dan pengendalian gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
 - e. Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
 - (1) Pengembangan kebijakan, pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa;
 - (2) Pengembangan kebijakan, pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa;
 - (3) Penguatan pembiayaan pembangunan desa.
- 5) **Misi 5** : Meningkatkan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan untuk Pembangunan yang Berkelanjutan, dengan kebijakan :
- a. Bidang Lingkungan Hidup
 - (1) Meningkatkan upaya-upaya perlindungan, pengendalian pencemaran dan pemantauan kualitas air dan udara;
 - (2) Meningkatkan upaya-upaya rehabilitasi lingkungan hidup dengan melibatkan peran serta masyarakat;
 - (3) Meningkatkan upaya-upaya koordinasi dan penegakan hukum, pengawasan AMDAL, UKL/UPL, pelaksanaan penyusunan KLHS;
 - (4) Mengembangkan sistem informasi manajemen lingkungan hidup;

- (5) Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana laboratorium pengujian lingkungan hidup;
- (6) Mengembangkan sistem regulasi, metode dan sarana prasarana pelayanan persampahan;
- (7) Mengembangkan penerapan pengelolaan sampah 3R berbasis masyarakat;
- (8) Peningkatan kapasitas SDM terutama PPNS bidang lingkungan hidup;
- (9) Penanganan lahan kritis dan pesisir pantai.

4.2. AGENDA PRIORITAS

Dalam rangka pencapaian pada masing-masing misi, maka difokuskan melalui beberapa agenda prioritas :

Agenda prioritas Misi Pertama, **Meningkatkan Kualitas Kehidupan Masyarakat yang Cerdas, Sehat, Berbudaya dan Religius yang Harmonis**, diarahkan sebagaimana tabel dibawah ini :

Tabel 4.2
Agenda Prioritas 1.1.
Peningkatan Akses dan Kualitas Pelayanan Pendidikan

No	Tematik	Fokus
1	Penuntasan Wajar Dikdas 9 Tahun dan Rintisan Wajar Dikdas 12 Tahun	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Kabupaten sinergi dengan BOS Pusat dan Provinsi 2. Subsidi biaya operasional SMA 3. Pembangunan Ruang Kelas Baru 4. Peningkatan kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan 5. Peningkatan sarana belajar sesuai standarisasi yang ditetapkan (Laboratorium, perpustakaan, ruang guru, ruang penjaga, ruang TU, WC, lapangan olah raga, Prasarana lingkungan sekolah)
2	Pengembangan pendidikan kejuruan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembangunan Sekolah Menengah Kejuruan berbasis kebutuhan dunia usaha/ dunia industri 2. Peningkatan sarana dan prasarana

No	Tematik	Fokus
		SMK yang terstandar 3. Subsidi SMK
3	Peningkatan Mutu pendidikan dan kesejahteraan Guru	1. Pemberian beasiswa tugas belajar 2. Fasilitasi sertifikasi standar kompetensi guru 3. Peningkatan kemampuan guru bidang studi 4. Peningkatan mutu peserta didik

Tabel 2.3
Agenda Prioritas 1.2.
Peningkatan Akses dan Kualitas Pelayanan Kesehatan

No	Tematik	Fokus
1	Pengembangan sistem jaminan kesehatan (<i>Universal coverage</i>)	Penyediaan dana dan peningkatan sistem pelayanan jaminan kesehatan bagi masyarakat
2	Pelayanan kesehatan ibu dan anak	1. Penanggulangan gizi buruk 2. Pemberdayaan Posyandu 3. Peningkatan kompetensi tenaga kesehatan (terutama bidan desa)
3	Peningkatan kinerja pelayanan kesehatan primer	1. Peningkatan puskesmas menjadi puskesmas rawat inap; dan puskesmas rawat inap mampu PONED secara bertahap sesuai standar yang berlaku 2. Optimalisasi kinerja pelayanan Poskesdes
4	Pemberantasan penyakit menular dan penyakit tidak menular	1. Pelayanan vaksinasi dasar lengkap 2. Pencegahan dan penanggulangan KLB Penyakit 3. Pengembangan <i>system surveillance</i>
5	Peningkatan perilaku hidup	1. Peningkatan upaya-upaya promosi kesehatan

No	Tematik	Fokus
	bersih dan sehat	2. Peningkatan kebersihan dan kesehatan lingkungan

Tabel 2.4
Agenda Prioritas 1.3.
Pembinaan dan Pengembangan Kehidupan Beragama yang Harmonis

No	Tematik	Fokus
1	Peningkatan kerukunan hidup antar dan inter umat beragama	1. Pengembangan komunikasi antar dan inter umat beragama 2. Pengembangan nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan bermasyarakat
2	Pembinaan dan fasilitasi kegiatan sosial keagamaan	1. Pembinaan kelembagaan sosial keagamaan 2. Peningkatan sarana dan prasarana keagamaan

Tabel 2.5
Agenda Prioritas 1.4.
Peningkatan Pelayanan Kesejahteraan Sosial

No	Tematik	Fokus
1	Peningkatan upaya-upaya penanggulangan kemiskinan	1. Optimalisasi kinerja tim koordinasi penanggulangan kemiskinan daerah 2. Penyusunan dan Evaluasi pelaksanaan RPJM Penanggulangan kemiskinan
2	Peningkatan pelayanan penyandang masalah kesejahteraan sosial	1. Penyediaan dan pemberdayaan panti rehabilitasi sosial 2. Advokasi, fasilitasi penanganan dan perlindungan anak dan perempuan 3. Penanganan masyarakat korban bencana

Agenda prioritas Misi Kedua **Penguatan Struktur dan Kelembagaan Ekonomi Daerah**, diarahkan sebagaimana tabel dibawah ini:

Tabel 2.6
Agenda Prioritas 2.1.
Pengembangan Ekonomi Lokal Berbasis Komoditas Unggulan Daerah

No	Tematik	Fokus
1	Revitalisasi sektor pertanian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan komoditas unggulan sebagai rintisan <i>one vilage one product</i> Pengembangan varietas benih adaptif 2. Optimasi lahan dan sumberdaya air bagi pertanian 3. Penguatan kelembagaan kelompok tani dalam bentuk Koperasi Tani yang <i>bankable</i> 4. Peningkatan kinerja penyuluhan pertanian 5. Pengembangan desain dan standar mutu beras karawang 6. Pengawasan peredaran pupuk dan pestisida 7. Fasilitasi teknologi dan mekanisasi pertanian
2	Pengembangan sentra produksi perikanan (mina bisnis)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan sentra produk-produk olahan hasil perikanan 2. Peningkatan sarana dan prasarana TPI, TPHT 3. Penguatan kelembagaan kelompok nelayan dan pembudidaya dalam bentuk Koperasi nelayan dan pembudidaya yang <i>bankable</i> 4. Pengembangan desain dan standar mutu hasil perikanan
3	Pengembangan IKM	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penataan sentra IKM Unggulan menuju <i>one village one product</i> sektor industri.
4	Pengembangan pasar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penataan pasar milik pemerintah 2. Fasilitasi pengembangan pasar desa 3. Terminal agribisnis (diutamakan Pasar Induk Beras) 4. Pembangunan sarana dan prasarana Rumah Potong Hewan (RPH) berbasis tata ruang
5	Penguatan kapasitas usaha KUMKM	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan kebijakan, fasilitasi dan penyediaan skema pembiayaan KUMKM 2. Pembinaan kelembagaan dan

No	Tematik	Fokus
		kewirausahaan KUMKM
6	Penyediaan fasilitas, regulasi dan iklim usaha kepariwisataan daerah	1. Pemantapan manajemen perencanaan ODTW 2. Pembuatan RIPPDA
7	Pengembangan sarana dan prasarana obyek daya tarik wisata (ODTW)	1. Pembuatan dan peningkatan sarana dan prasarana kampung budaya dan wisata gerbang Karawang (3 tahun) 2. Peningkatan sarana dan prasarana ODTW bukit Sanggabuana (4 tahun)

Tabel 2.7
Agenda Prioritas 2.2
Penurunan Angka Pengangguran dan Perlindungan
Ketenagakerjaan

No	Tematik	Fokus
1	Perluasan Kesempatan Kerja	1. Peningkatan Kualitas SDM Tenaga Kerja 2. Penyediaan Sistem Informasi Bursa Tenaga Kerja 3. Pengembangan Regulasi Penempatan Tenaga Kerja
2	Perlindungan Ketenagakerjaan	1. Penerapan Sistem Pengawasan Kesehatan dan Keselamatan Kerja bagi Tenaga Kerja 2. Pengembangan Regulasi dan Pengawasan Kebijakan UMK 3. Fasilitasi Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (PHI) 4. Perlindungan TKI

Agenda prioritas Misi Ketiga **Meningkatkan Pelayanan Ketersediaan Infrastruktur Wilayah**, diarahkan sebagaimana tabel dibawah ini :

Tabel 2.8
Agenda Prioritas 3.1
Pengembangan Sistem Transportasi Kabupaten

No	Tematik	Fokus
1	Peningkatan Jaringan Jalan	1. Mengembangkan ruas jalan Kolektor primer penghubung antar pusat

No	Tematik	Fokus
	dan Jembatan	<p>kegiatan (PKW - PKL, dan antar PKL) pada ruas jalan kabupaten</p> <p>2. Meningkatkan infrastruktur jalan penghubung pusat pengembangan wilayah (kolektor sekunder PKL/PPL dan antar PPL) pada ruas jalan Kabupaten</p> <p>3. Meningkatkan infrastruktur jalan pedesaan dengan diarahkan pada meningkatkan infrastruktur jalan poros desa penghubung PPK/PPL dengan desa</p> <p>4. Pembangunan Jembatan Penghubung Strategis</p> <p>5. Jalan antar kawasan</p>
2	Pengembangan Sistem Moda Transportasi	<p>1. Pengembangan Regulasi sistim transportasi Kabupaten</p> <p>2. Pembangunan Terminal</p> <p>3. Peningkatan sarana prasarana transportasi</p>

Tabel 2.9
Agenda Prioritas 3.2
Pengelolaan Sumberdaya Air

No	Tematik	Fokus
1	Peningkatan upaya upaya pemanfaatan sumber daya air secara berkelanjutan	<p>1. Pengelolaan pemanfaatan dan pemeliharaan Infrastruktur Irigasi berbasis partisipasi masyarakat</p> <p>2. Perlindungan sumber daya air</p>
2	Pengembangan sistem prasarana pengendalian banjir	<p>1. Penyusunan <i>master plan</i> mitigasi bencana</p> <p>2. Penanganan abrasi pantai</p> <p>3. Koordinasi penanganan wilayah Daerah Aliran Sungai (DAS)</p>

Tabel 2.10
Agenda Prioritas 3.3
Peningkatan Sarana dan Prasarana Dasar Pemukiman dan Perumahan

No	Tematik	Fokus
1	Peningkatan akses dan mutu pelayanan air minum	1. Pelayanan Air Bersih Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)
2	Peningkatan kualitas lingkungan permukiman dan perumahan	1. Penataan Lingkungan Kumuh Permukiman (Penataan Kampung Layak Huni, meliputi Jalan Lingkungan, Drainase dan Sanitasi Lingkungan)

Tabel 2.11
Agenda Prioritas 3.4.
Penyediaan Prasarana Bangunan Pemerintahan dan Ruang Publik

No	Tematik	Fokus
1	Penyediaan bangunan Pemerintahan dan ruang publik	1. Penataan Gedung Kantor Pemerintah 2. Pembangunan <i>Public Space (prototype Karangpawitan)</i> di Pusat Kegiatan Lokal (PKL) 3. Penataan Taman Kota

Agenda prioritas Misi Keempat **Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan**, diarahkan sebagaimana tabel dibawah ini :

Tabel 2.12
Agenda Prioritas 4.1
Pemantapan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

No	Tematik	Fokus
1	Pengembangan sistem Administrasi pelayanan publik	1. Penataan sistem dan prosedur kerja pelayanan publik (PTSP, LPSE, <i>e-KTP</i>) 2. Peningkatan sarana dan prasarana kerja yang terstandar
2	Peningkatan kinerja dan kesejahteraan aparatur	1. Peningkatan kapasitas SDM aparatur (formal, teknis dan fungsional) 2. Penyusunan regulasi dan penerapan penilaian kinerja 3. Peningkatan tunjangan kesejahteraan pegawai
3	Peningkatan akuntabilitas,	1. Peningkatan dan optimalisasi pengelolaan PAD

No	Tematik	Fokus
	efektivitas dan efisiensi pengelolaan keuangan daerah	2. Pengembangan sistem manajemen aset daerah 3. Pengembangan sistem akuntansi keuangan daerah 4. Peningkatan sistem perencanaan pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah berbasis data 5. Peningkatan sistem pengawasan dan pengendalian internal
4	Meningkatkan upaya-upaya terciptanya masyarakat tertib sosial dan tertib hukum	1. Pengembangan sistem regulasi dan penegakan peraturan daerah 2. Peningkatan kapasitas lembaga legislatif 3. fasilitasi peningkatan peran dan fungsi partai politik dan organisasi sosial kemasyarakatan 4. Meningkatkan pembinaan trantibmas, satuan perlindungan masyarakat dan unsur rakyat terlatih lainnya

Tabel 2.13
 Agenda Prioritas 4.2
 Pemantapan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

No	Tematik	Fokus
1	Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Pembangunan Perdesaan	1. Pengembangan sistem dan penerapan regulasi, serta pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa 2. Fasilitasi peningkatan kemampuan keuangan, perangkat, kelembagaan dan administrasi desa 3. Pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan desa

Agenda prioritas Misi Kelima **Meningkatkan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup**, diarahkan sebagaimana tabel dibawah ini :

Tabel 2.14
Agenda Prioritas 5.1
Peningkatan Upaya Penanganan Bidang Lingkungan Hidup

No	Tematik	Fokus
1	Upaya perlindungan dan pengendalian pencemaran lingkungan hidup	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan sarana prasarana laboratorium pengujian lingkungan hidup 2. Peningkatan kapasitas SDM (diutamakan PPNS Bidang LH) 3. Penegakan peraturan bidang LH 4. Peningkatan upaya-upaya pengujian kualitas air dan udara
2	Upaya peningkatan kualitas lingkungan hidup	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyediaan ruang terbuka hijau 2. Pengembangan area mangrove di pesisir pantai (<i>green belt area</i> dan <i>silvo fishery</i>) 3. Penanganan lahan kritis (vegetasi DAS)

Tabel 2.15
Agenda Prioritas 5.2
Pelayanan Persampahan

No	Tematik	Fokus
1	Peningkatan kualitas cakupan pelayanan persampahan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan penyediaan sarana prasarana (TPSS, TPS) dan metoda pengolahan sampah di TPA menggunakan sistem <i>sanitary landfill</i>) 2. Pengembangan sistem pengolahan sampah 3R (<i>Recycle, Reduce, Reuse</i>) berbasis masyarakat

4.3. PRIORITAS PEMBANGUNAN

Prioritas pembangunan daerah Kabupaten Karawang tahun 2013 tak lepas dari beberapa pendekatan baik itu pendekatan eksisting maupun pendekatan capaian kinerja dari sektor-sektor yang menjadi sasaran prioritas pada RPJMD 2011-2015. Prioritas pembangunan

daerah tahun 2013 juga tidak lepas dari isu-isu strategis yang terjadi di Kabupaten Karawang.

Isu-isu strategis yang paling mendasar muncul pada bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, ekonomi kerakyatan, dan pemberdayaan masyarakat menyangkut penanggulangan kemiskinan. Di bidang pendidikan Sampai dengan tahun 2010, kondisi pendidikan di Kabupaten Karawang masih diwarnai dengan berbagai isu pokok antara lain masih rendahnya tingkat pendidikan, penyediaan sarana dan prasarana belajar yang terstandar juga persoalan mutu pendidik dan peserta didik.

Kondisi RLS, dipengaruhi juga oleh tingkat partisipasi masyarakat terhadap pendidikan yang diperlihatkan oleh Angka Partisipasi Sekolah (APS), Angka Partisipasi Murni (APM), Angka Partisipasi Kasar (APK).

Kondisi kesiapan fisik ruang kelas dalam rangka penyediaan layanan pendidikan bagi siswa masih belum optimal.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Sistem Pendidikan Nasional mensyaratkan bahwa seorang guru SD/MI minimal memiliki pendidikan Diploma II (D2), D3 untuk SMP/ MTs dan S1 untuk SMA/SMK/ MA. Pelayanan pendidikan anak usia dini juga belum berkembang. Hal ini selain dikarenakan pemahaman masyarakat akan pentingnya PAUD masih minim, sarana dan prasarana serta lembaga pengelolaan PAUD masih kurang dan belum terpadu.

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi masih belum berkembang, namun secara pemanfaatan sudah mulai dilakukan rintisan-rintisan diberbagai sektor pemerintah daerah, terutama terkait dalam bentuk kegiatan penelitian dan pengembangan (kaji terap), penerapan teknologi informatika dan aplikasi teknologi pertanian. Khususnya untuk kegiatan penelitian telah banyak dilakukan dalam rangka perbaikan pelayanan publik, namun demikian secara aplikatif masih sangat sulit untuk diterapkan.

Di bidang kesehatan Angka harapan Hidup di Kabupaten Karawang pada tahun 2010 mencapai 66,85 dan angka kematian bayi sebesar 191 orang per 1000 kelahiran hidup. Penyebab tingginya angka kematian bayi selain karena masalah infeksi/ penyakit dan berat bayi

lahir rendah, juga erat berkaitan dengan kondisi pada fase kehamilan. Sampai dengan tahun 2010, Data komposisi penolong kelahiran bayi dapat dijadikan salah satu indikator kesehatan ibu dan anak. Dari 136.946 balita sekitar 90,59 persen kelahirannya ditolong oleh bidan dan dokter, sedangkan sisanya sekitar hanya 9,41 persen ditolong oleh dukun bayi atau paraji. Dari data tersebut, sekitar 9,41 persen proses pertolongan persalinan masih dilakukan oleh dukun bayi. Artinya sejumlah persalinan tersebut memiliki peluang yang lebih besar untuk terkena infeksi atau perawatan pasca persalinan yang kurang baik termasuk kondisi alat bantu yang seadanya dibandingkan apabila dilakukan oleh tenaga medis seperti dokter atau bidan.

Air susu ibu (ASI) sangat penting artinya terhadap kesehatan balita. salah satu indikator yang bisa dilihat adalah lama menyusui. Dari seluruh balita di Karawang tahun 2010, sebanyak 136.946 balita atau 89,24 persen pernah diberi asi dengan lama menyusui rata-rata lebih dari 24 bulan. Dari angka tersebut Balita yang memperoleh layanan kesehatan (ditimbang) telah mencapai 176.075 atau sekitar 96 persen. Berdasarkan hasil penimbangan yang dilakukan diperoleh temuan kasus Balita Gizi Buruk sebesar 3.237 jiwa atau sekitar 1,12 persen dari jumlah Balita yang ditimbang. kasus Balita Gizi Kurang dengan jumlah kasus terbesar terjadi pada tahun 2004 sebesar 17,81 persen. Dan pada tahun 2005 dapat diturunkan menjadi sekitar 13,27 persen atau sebesar 23.363 jiwa.

Cakupan pelayanan imunisasi rata-rata baru menjangkau 88-99%, yaitu BCG sebesar 99,00 persen dengan frekuensi terbanyak satu kali sebesar 71,32 persen, DPT sebesar 96,00 persen dengan frekuensi terbanyak satu kali sebesar 57,06 persen, Polio sebesar 93,00 persen dengan frekuensi terbanyak satu kali sebesar 57,28 persen, Campak sebesar 96,00 persen dengan frekuensi terbanyak satu kali sebesar 62,87 persen, Hepatitis B sebesar 88,00 persen dengan frekuensi terbanyak satu kali sebesar 46,84 persen.

Selain indikator mortalitas, indikator lain yang digunakan untuk menentukan derajat kesehatan penduduk adalah angka kesakitan (morbidity rate). Dilihat dari intensitas pola penyakit yang diderita oleh masyarakat antara lain Tuberkulosis (TB) paru, Infeksi saluran pernapasan akut (ISPA), malaria, diare dan penyakit kulit. Selain itu,

Karawang juga menghadapi *emergency deseas* seperti : Demam Berdarah Dengue (DBD), *Human immunodeficiency virus/ acquired immune deficiency syndrome* (HIV/AIDS).

Dibidang ekonomi kerakyatan masih terdapat isu rendahnya tingkat pendapatan masyarakat khususnya yang bergerak disektor informal (pertanian) dan industri (buruh pabrik) karena di dasarkan pada tingkat kepemilikan lahan pertanian dan tingkat pendidikan. Hal ini mengakibatkan masih tingginya angka kemiskinan di Kabupaten karawang yang mencapai angka 13,06% begitu pula dengan tingkat pengangguran yang berada pada angka 10 %. Faktor tingginya angka-angka tersebut salah satunya tidak dimilikinya ketrampilan yang memadai dari masyarakat untuk menghadapi tantangan dunia industry yang berkembang di Kabupaten Karawang.

Dibidang infrastruktur, keterbatasan anggaran yang ada mengakibatkan masih terdapatnya ruas jalan yang rusak serta munculnya gejolak di masyarakat akan tuntutan infrastruktur jalan yang baik, seiring dengan berkembangnya karawang menjadi daerah industry.

Isu strategis yang lain adalah tantangan Kabupaten Karawang pada tahun 2013 dengan berkembangnya rencana pembangunan pelabuhan laut di Cilamaya dan Pembangunan bandara di Karawang Selatan, sehingga memunculkan pemikiran bagaimana masyarakat Karawang mampu menghadapi tantangan tersebut dengan tidak tergerus oleh kemajuan didaerahnya sendiri dari berbagai bidang baik social, ekonomi, budaya, sumber daya alam, pelestarian lingkungan hidup maupun pemanfaatan tata ruang .

Dari isu-isu strategis diatas, maka prioritas Program pembangunan daerah Kabupaten Karawang tahun 2013 difokuskan pada peningkatan Indeks Pembangunan Mansuia (IPM) melalui ;

1. Peningkatan kesejahteraan social melalui peningkatan kualitas pendidikan, pelayanan kesehatan dan pemberdayaan masyarakat serta perwujudan kehidupan social yang religious dan harmonis;
2. Peningkatan pembangunan ekonomi kerakyatan berbasis pertanian, perikanan, industry, perdagangan, koperasi, ketenagakerjaan dan pariwisata;

3. Peningkatan sarana dan prasarana dasar infrastruktur dan pembangunan pedesaan;
4. Optimalisasi pengelolaan potensi sumber daya alam, pelestarian fungsi lingkungan hidup dan tata ruang;
5. Peningkatan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bertanggungjawab:

BUPATI KARAWANG,

Ttd

ADE SWARA